



KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMBANG
KECAMATAN LENGAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 141.32/ 23 /Kpts/WN-KBG/I - 2019

TENTANG

**PENGESAHAN
KOLEKTOR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI BANGUNAN (PBB-P2)
NAGARI KAMBANG KECAMATAN LENGAYANG**

WALI NAGARI KAMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Realisasi Pungutan dari tunggakan PBB-P2 di masyarakat Nagari Kambang, maka perlu ditunjuk kolektor pemungutan PBB-P2 di Nagari Kambang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 'a', diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Kambang;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor : 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
10. Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurus dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUM Desa;
12. Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Desa, PDT dan Transmigrasi;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan batas Desa;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
22. Pemerintahan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
23. Pemerintahan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
24. Pemerintahan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang SPM Desa;
25. Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
27. Peraturan Kepala LKPP Nomor 22 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 2 Tahun 2016 tentang Nagari;

29. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 77 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019;
30. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 91 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
31. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara pembagian Dan penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
32. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 97 Tahun 2018 tentang Tata Cara pembagian Dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
33. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 98 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

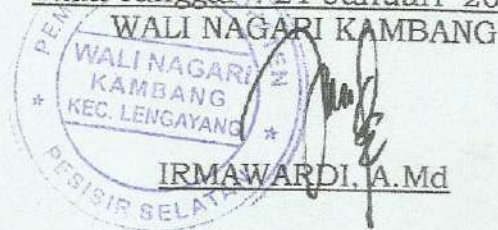
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Saudara yang namanya tersebut pada lajur '2' dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur '3' dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Dalam pelaksanaan tugas, kolektor Nagari Kambang dalam penyelesaian permasalahan PBB-P2 di Nagari Kambang untuk mencapai target PBB- P2 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- KETIGA : Insentive PBB-P2 diberikan kepada kolektor 10 % dari pungutan yang tercapai ditambah Rp. 1.000,-/ SPPT di bebaskan kepada Anggaran Pemerinatah Nagari sesuai dengan kemampuan Anggaran Pemerintah Nagari;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan berlaku untuk 1 (satu) tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Kambang dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : di Koto Baru
Pada Tanggal : 21 Januari 2019



Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Bapak Camat Lengayang di Padang Marapalam.
3. Sdr. Ketua BAMUS Nagari Kambang di Koto Baru.
4. Sdr. Yang bersangkutan
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMBANG
 NOMOR : 141.32 / 23 / Kpts / WN-KBG / I- 2019
 TANGGAL : 21 Januari 2019
 TENTANG : PENGESAHAN KOLEKTOR PEMUNGUTAN
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB-P2)
 NAGARI KAMBANG KECAMATAN LENGAYANG

NO	NAMA	JABATAN	KAMPUNG	KET
1	2	3	4	5
1.	IRMAWARDI, A.Md	Koordinator		Nagari
2.	RUSLI, A.Md	Koordinator		Nagari
3.	AFRIDA	Koordinator Nagari		Nagari
4.	YOPITA OCTORA PRIMA	Kolektor	Koto Baru	
5.	JUFRIJAL,SH	Kolektor	Medan Baik	
6.	ISMAEL	Kolektor	Kayu Kalek	
7.	AGUS	Kolektor	Pd.Limau Manis	
8.	DENITA USNI	Kolektor	Talang Tan Saidi	
9.	SYAMSIDAR	Kolektor	Nyiur Gading	
10.	MITA PRESVITA WANTI	Kolektor	Sumbaru	
11.	SRI WAHYUNI	Kolektor	Limau Manis Kulam	

Wali Nagari Kambang



IRMAWARDI, A.Md